

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh rakyat secara langsung menjadi satu fenomena demokratisasi yang telah menjalar pada tingkat lokal. Kontestasi politik di tingkat lokal ini memberikan dampak yang signifikan terutama bagi partai politik sendiri di mana eksistensinya kian besar. Hal ini dikarenakan partai politik menjadi satu organisasi yang sah dalam mengakomodir rakyat untuk berpartisipasi dalam mengisi jabatan publik di tingkat daerah baik di level eksekutif maupun legislatif. Sebagaimana salah satu fungsi dari partai politik itu yaitu sebagai sarana rekrutmen dan kaderisasi untuk menyeleksi individu-individu untuk mengisi jabatan politik ataupun jabatan pemerintahan (Haryanto, 1982: 46). Dengan keterbukaan partai politik sebagai sebuah kendaraan untuk melenggang dalam pertarungan memperebutkan kursi pemerintahan, mengisyaratkan bahwa peran partai politik dalam konteks ini begitu penting. Peran partai dalam pilkada dapat dikatakan sebagai pemasok kandidat kepala daerah. Sebagaimana dikatakan oleh Andre Bayo Ala (1985) bahwa partai politik merupakan sebuah asosiasi yang mengajukan calon-calonnya untuk dipilih melalui pemilu untuk mendapatkan jabatan.

Partai politik sejatinya merupakan sebuah infrastruktur politik di mana pengelolaan partai perlu menerapkan prinsip demokrasi di dalamnya sehingga dapat dikatakan juga bahwa partai politik menjadi parameter di dalam demokrasi itu sendiri. Terutama dalam kaitannya pada proses demokratisasi di Indonesia dalam hal pemilihan kepala daerah yang kini dengan format pemilihan secara langsung oleh rakyat. Namun proses demokratisasi tentunya harus sejalan tidak hanya bagaimana pilkada itu diselenggarakan namun juga pemilihan calon kandidat di dalam internal partai politik.

Dapat dikatakan bahwa terkait dengan demokrasi di dalam partai politik yang erat kaitannya dengan pemilihan kandidat itu sendiri ada pada dua dimensi

utama yaitu sentralisasi dan inklusivitas. Dapat dikatakan sebuah pemilihan kandidat itu demokratis apabila pemilihan tersebut ada pada struktur partai politik tingkat lokal sebab keputusan tersebut terdesentralisasi bagi mereka yang diwakili oleh kandidat dan tentunya semakin banyak yang berpartisipasi dalam proses tersebut sehingga memberi hak lebih banyak bagi pemilih (Cross, 2008). Namun dalam perjalanannya, perhelatan pilkada sering diwarnai oleh praktik yang tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi terutama dalam rekrutmen bakal calon kepala daerah di dalam internal partai politik. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Gunawan, 2018) menyebutkan bahwa prinsip demokrasi tidak tecermin di dalam internal partai politik di mana wewenang DPP partai sangat kuat dalam menentukan calon yang akan bertarung dalam pilkada, sedangkan DPC partai sebatas mengusulkan nama-nama calon walaupun telah melalui proses penjaringan ditingkatkan daerah.

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh (Fitriyah, 2020) juga disebutkan bahwa kebanyakan partai politik dalam menjalankan salah fungsinya yaitu rekrutmen politik dalam menentukan bakal calon kepala daerah hanya mementingkan popularitas, elektabilitas tinggi berdasarkan survei opini publik, dan juga kekuatan finansial calon guna membiayai dirinya sendiri pada proses berjalannya kontestasi pilkada. Dapat dikatakan bahwa sikap partai sangat pragmatis tanpa mementingkan kualitas, integritas, dan kredibilitas dari calon kepala daerah itu sendiri.

Table 1: Rekrutmen Kepala Daerah Partai Politik di Indonesia

Rekrutmen Politik	Asal Calon	Seleksi Calon	Keputusan Akhir
PDIP	Terbuka- Terbatas	DPP	DPP
Partai Golkar	Terbuka- Terbatas	DPP	DPP
Partai Demokrat	Terbuka	DPD	DPP
Partai Gerindra	Terbuka	DPD	DPP
Partai Nasdem	Terbuka	DPC&DPD	DPP

PKB	Terbuka	DPC	DPP
PKS	Terbuka- Terbatas	Pemilu Internal	DPP
PPP	Terbuka	DPD	DPP
PAN	Terbuka	DPC	DPD (untuk calon bupati/walikota) DPP (untuk calon gubernur)

Sumber: Fitriyah (2020: 12-13)

Di dalam jurnal yang ditulis oleh Fitriyah berdasarkan studi literatur hasil penelitian tentang rekrutmen politik pilkada di sejumlah daerah menyebutkan bahwa mayoritas partai politik menerapkan bahwa asal calon kepala daerah bersifat terbuka yang berarti bahwa partai politik membuka kesempatan bagi setiap kalangan tidak hanya kader di dalam internal partainya namun non kader itu sendiri untuk mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah melalui partai politik. Adapun kategorisasi terbuka terbatas diartikan bahwa partai politik tersebut lebih mengedepankan calon yang berasal dari kadernya sendiri dengan menambahkan salah syarat khusus yang diperuntukan untuknya. Hal ini seperti yang dilakukan oleh partai PDI-Perjuangan yang menambahkan syarat minimal tiga tahun sebagai anggota partai (Fitriyah, 2020).

Berdasarkan tabel diatas terlihat juga bahwa internal partai politik di Indonesia sendiri menyimpan persoalan yang cukup pelik perihal rekrutmen bakal calon kepala daerah. Ketergantungan yang sangat besar kepada kepengurusan di tingkat pusat dalam menentukan calon akan berdampak kepada kemandirian struktur partai di tingkat daerah untuk melahirkan calon-calon yang memang menjadi representasi daerah mereka. Hal ini terlihat dari keputusan akhir menjadi wewenang dari DPP serta serta petinggi partai sehingga jika kita perhatikan wewenang DPC dan DPD hanya sebatas melakukan penjaringan serta mengajukan nama dari hasil penjaringan tersebut. Kondisi ini dapat dikatakan menjadi satu krisis demokrasi di dalam penyelenggaraan pilkada di mana elit

partai politik baik ditingkat nasional maupun lokal memiliki andil kuat terhadap proses rekrutmen bakal calon yang akan dijadikan kandidat yang akan melenggang pada pemilihan kepala daerah (Haboddin, 2016)

Fenomena seperti yang digambarkan di atas tidak lepas dari sebuah persoalan partai politik dewasa ini di mana sebelum perhelatan pilkada serentak dilangsungkan di dalam internal partai politik sendiri memperlihatkan bahwa kuatnya kecenderungan partai politik sebagai arena pertarungan kepentingan bagi pemimpinnya. Dapat dikatakan hal seperti ini tidak bisa dilepaskan dari pribadi seorang pemimpin partai sehingga partai itu sendiri terjebak dalam apa yang disebut dengan personalisasi dengan otoritas petinggi partai yang memegang kendali penuh atas partainya sehingga partai tersebut jauh dari prinsip demokrasi.

Personalisasi partai politik dapat diartikan sebagai kondisi individu yang memiliki *positioning* penting di dalam partai yang mampu merubah partai yang pada dasarnya memiliki identitas kolektif menjadi kepentingan pribadi (Karvonen, 2010). Karakteristik yang terlihat dari personalisasi partai bahwa pemimpin memegang kekuasaan besar: menentukan arah dan visi *platform* dan kampanye partai; mengajukan calon; memutuskan alokasi sumber daya organisasi; dan memegang kekuasaan atas politisi di partai mereka. Selain itu, pejabat partai dan politisi mengakui dan menerima kekuasaan ini sebagai otoritas yang sah (Kostadinova & Levitt, 2014). Karakteristik selanjutnya adalah lemahnya sistem kelembagaan partai politik terutama apabila menyangkut rekrutmen bakal calon kepala daerah. Kemandirian struktur partai di tingkat lokal tidak dapat terjadi dikarenakan kewenangannya yang terbatas sehingga rekrutmen yang terjadi kerap tidak mencerminkan representasi daerahnya sehingga hal ini cenderung terlihat sebagai praktek yang manipulatif.

Sebagai salah satu partai besar di Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memiliki basis kekuatan yang cukup besar terutama di kota Solo yang dapat dikatakan sebagai markas dari partai tersebut. Mengingat bahwa estafet kepemimpinan walikota Solo selalu dipegang oleh

kader PDI-P pada setiap perhelatan pilkada. Pada pilkada serentak tahun 2020 menjadi satu momentum untuk kembali mengamankan kekuasaan kursi walikota Solo. Terlebih bahwa kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) cukup besar yaitu 67% (kota-surakarta.kpu.go.id) membuat PDI-P dapat mengusung kadernya untuk bertarung pada pilkada serentak 2020. Sebagaimana yang tertuang dalam UU No 1 tahun 2015 tentang pilkada pada pasal 40 ayat 1 menjelaskan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Dalam menentukan bakal calon yang akan diusung untuk bertarung dalam kontestasi pilkada, PDI-P memiliki mekanisme sendiri yang mengatur hal tersebut. Sebagaimana yang tertuang di dalam peraturan partai pada Nomor 24 Tahun 2017, proses rekrutmen kepala daerah pada peraturan tersebut penerapannya bersifat berjenjang dilihat dari di mana perhelatan pilkada tersebut dilaksanakan. Apabila berada di tingkat kota/kabupaten, ini menjadi wewenang Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI-P) setempat untuk melakukan penjurangan. Setelah proses penjurangan tersebut usai, diserahkan berita acara kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi, dan terakhir proses penyaringan serta penetapan dilakukan oleh (Dewan Pimpinan Pusat) DPP Partai. Apabila pilkada diselenggarakan ditingkat provinsi, maka yang memiliki wewenang untuk melakukan penjurangan adalah DPD PDI-P provinsi tersebut. Setelah proses penjurangan tersebut diserahkan berita acara yang langsung ditujukan kepada DPP Partai untuk selanjutnya dilakukan proses yang sama yaitu penyaringan dan penetapan. DPP sendiri yang memegang kendali atas keputusan penetapan bakal calon kepala daerah. Baik DPD maupun DPC hanya bertugas melakukan penjurangan. Namun tidak menutup kemungkinan hasil penjurangan tersebut yang disetujui oleh DPP PDI-P.

Untuk kasus kota Solo pada pilkada serentak tahun 2020 DPC PDI-P telah menentukan bakal calon melalui mekanisme penjangkauan tertutup di mana seluruh struktur partai telah memberikan dukungan terhadap pasangan calon Achmad Purnomo dan Teguh Prakosa sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Solo 2020. Keputusan ini berdasarkan kesepakatan dan juga dukungan mulai dari anak ranting, ranting, hingga anak cabang PDI-P (GatraCom, 2019). Pada pengumuman 45 calon kepala daerah yang akan bertarung pada pilkada serentak menyertakan nama Gibran Rakabuming Raka didampingi Teguh Prakosa yang maju dalam pemilihan walikota Solo. Gibran sendiri terpilih sebagai calon walikota Solo setelah mendapat rekomendasi dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno Putri (VOI, 2020).

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan fungsi rekrutmen bakal calon yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam menentukan calon walikota Solo. Hal ini menyangkut bagaimana kelembagaan partai politik dilihat dari bagaimana mekanisme rekrutmen bakal calon yang dilakukan PDI-P terutama erat kaitannya dengan keputusan imbas dari personalisasi partai. Sebagaimana diketahui bersama bahwa PDI-P sendiri menjadi partai yang telah lama berkuasa di kota Solo. Tentunya penentuan seorang calon menjadi aspek yang sangat krusial dalam mengamankan kekuasaan. Gibran sendiri merupakan putra dari Presiden Joko Widodo yang tentunya memiliki latar belakang kuat serta popularitas yang menjanjikan, sehingga hal ini mengesampingkan faktor loyalitas calon yang telah ditentukan sebelumnya yang dapat dikatakan sudah lebih lama menjadi kader PDI-P. Hal ini tidak lepas dari pengaruh ketua umum partai dalam proses pemilihan kandidat di dalam partai.

Untuk itu, sebagaimana yang diungkapkan Cross dan Bottomore (dalam Pamungkas, 2011) rekrutmen politik menjadi wajah atau karakter bagi partai politik itu sendiri 1) rekrutmen dapat mengindikasikan pola kekuasaan di dalam partai politik. Apakah kekuasaan tersebut bersifat sentralistik atau desentralistik. 2) rekrutmen juga dapat memperlihatkan ada atau tidaknya rotasi elit di internal partai politik sehingga berdampak kepada citra partai di depan

publik. 3) rekrutmen politik dapat mendefinisikan tipe atau karakteristik partai politik. Menganalisis rekrutmen di dalam partai politik dapat memahami dinamika yang terjadi dalam proses berjalannya rekrutmen tersebut yang memperlihatkan bagaimana kelembagaan atau pengelolaan partai politik itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Dinamika Personalisasi Partai Politik Dalam Fungsi Rekrutmen Bakal Calon Walikota Solo 2020 Pada Internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan”**.

Menganalisa mengenai demokratisasi fungsi rekrutmen bakal calon di dalam internal partai di Indonesia menjadi hal yang menarik untuk dilihat perkembangannya sejauh ini. Pada dasarnya hal ini juga memiliki keterkaitan erat dengan bagaimana sistem demokrasi yang dianut negara Indonesia. Mengingat bahwa partai politik sendiri menjadi elemen penting dari demokrasi di dalam suatu negara baik dalam hal keterlibatannya di dalam pemilihan umum ataupun juga pilkada dalam konteks lokal. Sejak adanya pilkada secara langsung dipilih oleh rakyat, partai politik memiliki eksistensi yang lebih terutama dalam kaitannya menghasilkan bakal calon yang akan bertarung dalam kontestasi pilkada. Maka dari itu, melihat sejauh mana demokratisasi di dalam partai politik terkait dengan penentuan kandidat atau bakal calon kepala daerah menjadi satu penilaian bagi partai itu sendiri apakah partai tersebut menerapkan sistem demokrasi atau tidak.

Penelitian yang berjudul **“Dinamika Personalisasi Partai Politik Dalam Fungsi Rekrutmen Bakal Calon Walikota Solo 2020 Pada Internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan”** memerlukan beberapa peninjauan dari penelitian-penelitian terdahulu. Terdapat beberapa rujukan yang dijadikan tinjauan pustaka penulis berkaitan dengan topik yang relevan guna mencari persamaan dan perbedaan dari topik penelitian tersebut. **Penelitian pertama** yang dijadikan rujukan penulis adalah jurnal yang berjudul **“Menimbang Pentingnya Desentralisasi Partai Politik Di Indonesia”** ditulis oleh Ahmad

Solikhin (2017). Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana perjalanan partai politik di Indonesia terkait dinamika dalam kontestasi politik yang terjadi di mana adanya pasang surut dari waktu ke waktu. Namun dinamika yang paling tampak sejauh ini masih adanya dominasi atau pengaruh kuat hierarki struktur partai tertinggi. Hal ini tentunya disebabkan karena sistem kepengurusan dalam internal partai di Indonesia masih bersifat sentralistik sehingga harapan kepada desentralisasi partai politik di tingkat lokal menjadi hal yang sulit untuk direalisasikan. Sebagaimana tujuan desentralisasi sendiri tidak hanya terkait dengan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri, namun juga termasuk peran bagaimana partai mampu mencetak calon-calon yang baik berdasarkan representasi masyarakat setempat diiringi dengan pemilihan langsung oleh masyarakat itu sendiri (Solikhin, 2017).

Persamaan jurnal yang ditulis oleh Ahmad Solikhin (2017) dengan penelitian penulis adalah mendeskripsikan mengenai dinamika yang terjadi pada desentralisasi partai politik di Indonesia dengan melihat berbagai permasalahan yang kerap ditemukan yang mempengaruhi dari desentralisasi partai politik tersebut. Di sisi lain, perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian penulis adalah jurnal tersebut melihat gambaran umum mengenai pentingnya desentralisasi partai politik terutama bagi kondisi politik ditingkat lokal sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada desentralisasi partai politik dilihat dari fungsi rekrutmen politik yang terjadi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam menentukan calon Walikota Solo dalam PILKADA 2020.

Penelitian kedua yang menjadi rujukan penulis adalah jurnal yang berjudul “Peran Ketua Umum Partai Politik Dalam Pencalonan Kepala Daerah Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia”. Penelitian ini ditulis oleh Siti Witianti dan Hendra (2019). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif analisis serta pengumpulan data berdasarkan studi literatur. Penelitian ini menjelaskan adanya kecenderungan dominasi ketua partai politik dalam penentuan calon kepala daerah pada perhelatan pilkada serentak yang telah dimulai sejak tahun 2015. Ketua umum partai sendiri telah

menjadi tokoh sentral yang tidak dapat dilepaskan pengaruhnya dari struktur partai. Disamping itu dijelaskan pula permasalahan yang terus menyelimuti perhelatan pemilu di Indonesia diantaranya ideologi partai politik yang kian menyusut, finansial pendukung yang kian berkurang, dan mandeknya rekrutmen politik (Witianti & Hendra, 2019).

Terkait dengan rekrutmen bakal calon kepala daerah sendiri yang diwarnai dengan adanya intervensi ketua umum partai atau kepengurusan partai ditingkat pusat diakibatkan beberapa faktor antara lain: pertama, konsekuensi pembentukan partai politik yang bersifat *top down*. Kedua, partai-partai di Indonesia belum terinstitusionalisasi yang dapat diartikan telah mencakup empat dimensi yang meliputinya seperti kompetisi partai yang stabil, partai memiliki basis dukungan yang kuat di masyarakat, kesadaran dari elit ataupun warga negara bahwasannya keberadaan partai politik begitu penting dalam demokrasi, dan organisasi partai lebih baik, dalam hal struktur internal, prosedur, dan kejelasan dalam rutinitas yang menyangkut pergantian kepemimpinan di dalam partai itu sendiri.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ada pada terkait dinamika rekrutmen bakal calon kepala daerah pada pilkada serentak di mana kecenderungan adanya pengaruh kuat ketua umum partai atau kepengurusan partai tingkat pusat dalam penentuan kepala daerah. Perbedaan antara jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu jurnal ini memberikan gambaran umum mengenai dinamika rekrutmen bakal calon kepala daerah di mayoritas partai di Indonesia. Sedangkan penulis hanya memfokuskan pada rekrutmen bakal calon Walikota Solo Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada pilkada serentak 2020.

Penelitian ketiga yang menjadi rujukan penulis selanjutnya adalah artikel yang berjudul “Anomali Kewenangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dalam Sistem Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia” Penelitian ini ditulis oleh Wawan Gunawan (2018). Penelitian ini menjelaskan bahwa desentralisasi merupakan bagian penting dalam proses demokratisasi dalam

sebuah negara hingga pada tingkat lokal. Perkembangan desentralisasi sendiri dapat diperhatikan melalui dua hal diantaranya ada pada suprastruktur politik yang menyangkut di dalamnya peran eksekutif. Lalu infrastruktur politik yang ada pada partai politik di mana dimaknai sebagai pelimpahan wewenang kepengurusan partai di tingkat pusat kepada kepengurusan partai di tingkat daerah khususnya dalam hal rekrutmen politik termasuk bakal calon kepala daerah. Rekrutmen bakal calon yang sejatinya menerapkan prinsip kompetisi di dalam partai berujung pada sejauh mana kedekatan dengan pengurus partai ditingkat pusat terlebih yang mementingkan popularitas calon yang menjadi nilai utama (Gunawan, 2018). Penelitian ini juga menyoroti bahwa partai politik memandang kontestasi politik di tingkat lokal sebagai sebuah ajang yang dapat menjadi konsolidasi politik utama untuk memenangkan calon legislative ditingkat pusat ataupun pemilihan presiden sekalipun.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ada pada menyoroti bagaimana desentralisasi terjadi di dalam tubuh partai politik terkait dengan penentuan rekrutmen bakal calon kepala daerah yang seharusnya menjadi wewenang kepengurusan partai di tingkat lokal. Sehingga ini akan mendorong kemandirian partai politik di tingkat daerah sebagaimana juga meningkatkan proses demokratisasi. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis bahwa kurangnya mendalami dalam hal bagaimana dinamika yang terjadi di dalam internal partai dalam hal penentuan calon kepala daerah yang akan mengikuti kontestasi politik hanya memberikan gambaran umum yang terjadi di partai-partai Indonesia. Sedangkan penulis mencoba mendalami hal tersebut yang dirasa sangat menarik untuk diteliti.

Penelitian keempat yang menjadi rujukan penulis selanjutnya adalah artikel yang berjudul *“Inside The Personal Party: Leader-owners, light organizations and limited lifepans”*. Penelitian ini ditulis oleh Glenn Kefford dan Duncan McDonnell (2018). Dalam penelitian ini menjelaskan tentang fenomena personalisasi di dalam partai politik atau disebut sebagai dominasi tunggal seorang ketua partai yang menggeserkan partai sebagai organisasi kolektif menjadi sebuah organisasi yang menjadi kepentingan seorang ketua

umum. Dengan membandingkan dua partai sekaligus yaitu partai Silvio Berlusconi di Italia dan partai Clive Palmer di Australia. Penulis mengidentifikasi kedua partai ini dengan dua pendekatan utama untuk melihat adanya personalisasi di dalam partai politik. Yaitu hubungan pemimpin di dalam partai dan hubungan partai dengan anggotanya.

Bahwa terdapat indikasi kuat kedua partai tersebut menjadi sebuah partai yang terpersonalisasi oleh pengaruh kuat ketua umum partai yang sekaligus sebagai pendiri partai tersebut. Hal yang paling mendasar terlihat di dalam kedua peraturan partai tersebut yang sangat memperlihatkan segala keputusan terkait dengan partai tersebut berada di tangan ketua partai sehingga tidak adanya perbedaan pendapat di dalam partai. Selanjutnya terkait dengan organisasi partai itu sendiri di mana peran struktur partai di tingkat lokal sangat lemah. Keikutsertaan partai di tingkat lokal hanya sebatas keterlibatan di dalam pemilu sebagai relawan pemenangan. Fenomena personalisasi partai ini disebut sebagai sebuah kondisi yang kerap terjadi di dalam demokrasi dewasa ini.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi personalisasi di dalam partai politik yaitu dominasi ketua umum dan lemahnya kapasitas organisasi. Perbedaan tentunya pada objek yang menjadi fokus penelitian di mana penelitian ini mengidentifikasi dua partai sekaligus dengan membandingkan keadaan kedua partai tersebut sedangkan penulis hanya fokus pada satu partai politik dengan menganalisis satu fungsi partai yang terdapat keterlibatan ketua umum partai yaitu penentuan kandidat untuk mengisi jabatan publik sebagai calon walikota.

Penelitian kelima yang menjadi rujukan penulis selanjutnya adalah artikel yang berjudul *“Personalist Parties in the Third Wave of Democratization: A Comparative Analysis of Peru and Bulgaria”*. Artikel ini ditulis oleh Barry Levitt dan Tatiana Kostadinova (2014). Penelitian ini menggunakan studi perbandingan antara negara Peru dengan Bulgaria di mana kedua negara tersebut dapat dikatakan memasuki fase demokratisasi di dalam sistem politik mereka ditandai dengan munculnya partai-partai politik. Dalam

fase demokratisasi tersebut diiringi dengan kemunculan fenomena di dalam partai politik yang disebut dengan personalisasi partai. Di mana partai politik sangat melekat dengan satu individu penguasa di dalamnya yang tidak dapat dipisahkan. Penelitian ini menganalisis pola kemunculan partai personalis di kedua negara tersebut dengan menghubungkan kausalitas antara pendekatan institusionalis, dampak regulasi dan pembiayaan partai, dan sistem pemerintahan. Dua hal mendasar yang menjadi faktor munculnya individu kuat di dalam partai politik yaitu adanya pengaruh dari sejarah dan budaya di suatu negara seperti halnya kondisi otoritarianisme yang pernah di alami membuat pola kekuasaan bersifat sentralistik dan tidak terjadi praktek pluralistik. Selain itu juga adanya krisis ekonomi yang pernah di alami menyebabkan ketidakpuasan terhadap partai-partai sebelumnya. Namun yang membedakan kedua negara tersebut adalah perbedaan institusional yang diadopsi di negara masing di mana sistem presidensial dan sistem parlementer mempengaruhi seberapa besar partai-partai personalis di mana Peru mengalami pertumbuhan yang cukup besar dibanding dengan Bulgaria.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada dampak yang ditimbulkan dari adanya personalisasi partai yang terhadap demokrasi. Personalisasi partai sendiri dapat dikatakan memiliki dapat bertahan cukup lama di dalam internal partai politik yang pada akhirnya dapat mengancam demokrasi internal partai itu sendiri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada objek penelitian di mana penelitian ini memiliki lingkup yang cukup besar di dalam dua negara dengan melihat kecenderungan munculnya partai-partai personalis di dalam politik mereka sedangkan penulis menganalisis satu partai terkait dengan pengaruh personalisasi terhadap bagaimana calon kandidat kepala daerah ditentukan.

Penelitian keenam yang menjadi rujukan penulis selanjutnya adalah jurnal yang berjudul “*The Personalization of Italian Political Parties in Three Acts*”. Artikel ini ditulis oleh Fortunato Musella (2020). Artikel ini menjelaskan tentang fenomena personalisasi dalam dunia politik yang termasuk di dalamnya partai politik sebagai organisasi yang memiliki peran cukup besar di dalam

demokrasi. Dengan menambahkan keterkaitan pada kemajuan teknologi dewasa ini terutama dengan adanya internet sebagai saluran komunikasi massal pada personalisasi partai politik membuat peran sentral individu sebagai pemimpin partai menjadi lebih kuat, sehingga secara struktural partai politik sendiri terjadi pergeseran yang cukup radikal di mana partai politik sendiri sebelumnya dikonotasikan sebagai sebuah organisasi kolektif yang pada perjalanannya berubah menjadi otonomi kekuasaan tunggal yang merambah pada lingkup lokal sekalipun. Adanya personalisasi di dalam partai politik memberikan keleluasaan bagi pimpinan partai untuk melakukan intervensi terhadap penentuan kandidat bahkan yang telah berada di dalam jabatan publik sebagai anggota parlemen (Musella, 2020). Hal ini menandakan bahwa partai politik telah mengalami kemunduran sebagai elemen yang tergabung di dalam demokrasi.

Persamaan artikel ini dengan penelitian penulis pada terdapatnya peran pemimpin partai yang sangat dominan di dalam partai politik. Peran dominan tersebut pada akhirnya mengikis nilai-nilai demokrasi seperti partisipasi anggota partai atau adanya kompetisi di dalam partai politik untuk dijadikan kandidat yang akan mengisi jabatan publik baik di level eksekutif maupun legislatif. Perbedaan artikel ini dengan penelitian penulis yaitu pada sudut pandang dari personalisasi partai politik di mana artikel ini menyoroti begitu luas terutama dalam aspek eksistensi kepemimpinannya yang kian besar terutama dengan adanya faktor pendorong seperti kemajuan teknologi informasi sedangkan penulis lebih menekankan bahwa personalisasi partai politik terlihat dalam penentuan kandidat walikota di mana peran penentu tersebut dimiliki oleh ketua umum partai politik sebagai pemimpin yang memiliki keputusan mutlak.

Penelitian ketujuh yang menjadi rujukan penulis selanjutnya yaitu jurnal yang berjudul “*Party Candidate Selection before and after the Change of Ruling Parties A Study of the 2005 and 2009 Local Executive Elections in Taiwan*”. Jurnal ini ditulis oleh Dafydd Fell, Eliyahu V. Sapir, dan Jonathan Sullivan (2013). Jurnal ini menjelaskan mengenai perbedaan fenomena yang terjadi pada kontestasi politik di tingkat lokal 2005 dan 2009. Perbedaan diantara kontestasi tersebut terlihat sangat jelas pada bagaimana proses memutuskan

kandidat. Pada kontestasi politik 2005 partai-partai di Taiwan umumnya melakukan proses pemilihan kandidat secara inklusif dengan melibatkan anggota partai. Berbeda dengan tahun 2009 pemilihan kandidat cenderung mengarah pada eksklusivitas terlebih ditemukan juga pimpinan partai di tingkat nasional yang melakukan intervensi pada proses tersebut. Disamping perbedaan diantara kedua kontestasi politik tersebut terlihat jelas pada dinamika di dalam partai. Bahwa pemilihan kandidat secara inklusif cenderung dapat menjadi kompromi di dalam partai dan menghindari potensi adanya perpecahan di dalam partai. Hal ini tentunya memperlihatkan demokrasi di dalam internal partai (Fell, Sapir, & Sullivan, 2013).

Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis pada fokus penelitian yang berada di tingkat lokal yang terkait dengan proses pemilihan kandidat atau bakal calon yang akan mengikuti kontestasi politik dalam memperebutkan jabatan publik serta dinamika dalam proses tersebut di dalam partai. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis pada objek penelitian di mana jurnal ini memberikan penjelasan proses penentuan kandidat di berbagai daerah tingkat lokal di Taiwan, sedangkan penulis hanya memfokuskan pada kontestasi politik pemilihan bakal calon walikota di kota Solo.

Penelitian kedelapan yang menjadi rujukan penulis selanjutnya yaitu jurnal yang berjudul “*Political Recruitment and Candidate Selection in Latin America: A Framework for Analysis*”. Jurnal ini ditulis oleh Peter Siavelis dan Scott Morgenstern (2008). Jurnal ini menjelaskan bahwa dalam hal rekrutmen kandidat diliputi sebuah kompleksitas yang begitu jelas yang umumnya ditemukan berbeda dengan proses rekrutmen berdasarkan teoritis. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif yang meliputi karakter kandidat yang berimplikasi keada perilaku kandidat dalam pasca pemilihan electoral dan juga hasil dari perolehan suara dengan melihat contoh kasus yang terjadi di negara-negara Amerika Latin. Terkait dengan rekrutmen politik sendiri secara umum tergambar bahwa pada prosesnya kerap kali menjadi ajang kompromi antara partai politik, kandidat, dan koalisi dalam penentuannya sehingga hal ini menjadi dinamika tersendiri dalam rekrutmen kandidat (Siavelis & Morgenstern, 2008).

Penelitian ini mengulas dua lembaga sekaligus dalam penentuan kandidat di dalam partai yaitu legislatif dan juga eksekutif dengan menganalisis beberapa komponen utama diantaranya partai politik dan sistem hukum pencalonan kandidat di suatu negara yang menjadi arena sentral penentuan kandidat calon. Selain itu juga menyertakan berbagai tipe kandidat di masing-masing lembaga baik itu legislatif dan juga eksekutif di mana tipe-tipe tersebut memiliki karakteristik dan juga bagaimana relasinya terhadap partai serta konstituen yang pada akhirnya juga nampak pada bagaimana jabatan publik itu dilaksanakan.

Perasamaan jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu pada peran sentral partai politik dalam menentukan calon kandidat potensial yang akan mengikuti kontestasi politik di mana rekrutmen ini berada pada lembaga eksekutif. Terkait perbedaan diantara jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu lembaga politik yang diteliti di mana jurnal ini meneliti lembaga eksekutif presiden dan gubernur sedangkan penulis walikota serta penulis hanya meneliti lembaga eksekutif saja sedangkan jurnal ini juga meneliti lembaga legislatif.

Penelitian kesembilan yang menjadi rujukan penulis selanjutnya yaitu jurnal yang berjudul "*Political parties, Candidate Selection, and Quality of Government*". Jurnal tersebut ditulis oleh Fernando M. Aragon (2013). Penelitian ini memberikan penjelasan mengenai hubungan kausalitas antara seleksi kandidat dengan kualitas pemerintahan dengan melihat contoh kasus pencalonan presiden di Amerika Latin. Hubungan antara keduanya dapat dikatakan sangat terikat atau saling mempengaruhi di mana kualitas pemerintahan dimulai dari bagaimana proses seleksi kandidat di dalam partai yang memunculkan sebuah kompetisi di dalamnya yang pada akhirnya berdampak pada kualitas demokrasi. Hal itu tentunya terjadi bila mana partai menjalankan fungsinya dengan baik terutama dalam aspek rekrutmen serta kaderisasi. Dengan kata lain bahwa keduanya memiliki hubungan positif yang memiliki hubungan pengaruh diantara keduanya (Aragón, 2013).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ada pada bagaimana mengamati proses rekrutmen pemilihan kandidat bakal calon di dalam partai. Bahwa partai itu sendiri menjadi tonggak utama demokrasi di mana pada proses di dalam penentuan bakal calon yang mengisi jabatan publik harus menerapkan prinsi-prinsip demokrasi tersebut salah satunya yaitu adanya persaingan sehat di dalam partai. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada jabatan publik yang menjadi objek penelitian di mana jurnal ini meneliti penentuan calon presiden sedangkan penelitian penulis adalah walikota.

Penelitian kesepuluh yang menjadi rujukan penulis selanjutnya yaitu jurnal yang berjudul “*Local preferences in candidate selection. Evidence from a Conjoint Experiment among party leaders in Germany*”. Jurnal ini ditulis oleh Michael Jankowski dan Jan Berz (2021). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan studi eksperimen melihat atribut apa saja yang menjadi preferensi dalam memilih kandidat ideal yang dilakukan oleh pemimpin partai lokal di Jerman. Penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat komponen pertimbangan utama dalam menentukan kandidat yang akan diproyeksikan untuk menduduki jabatan publik diantaranya adalah pengalaman politik dan juga keterlibatan bakal calon di dalam internal partai. Disamping itu juga ada faktor lain yang juga mempengaruhi pemimpin partai lokal dalam menentukan kandidat yaitu faktor sosio demografis mereka yang memiliki kesamaan dengan pemimpin partai lokal (Jankowski & Berz, 2021). Hal ini terjadi imbas dari ketidakpuasan pemimpin partai lokal kepada pemimpin partai ditingkat nasional. Sehingga ini menjadi sebuah ajang tersendiri karena sistem multi level yang terdesentralisasi.

Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu terkait dengan mendalami faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam menentukan kandidat yang akan bertarung dalam kontestasi politik. Dengan memperlihatkan faktor-faktor yang serupa. Namun terkait dengan perbedaan diantara jurnal ini dengan penelitian penulis terletak pada bagaimana penelitian tersebut dilakukan. Tentunya penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan melihat preferensi apa saja yang menjadi pertimbangan pemimpin partai lokal dalam

menentukan kandidat atau bakal calon. Sedangkan penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan kedalaman sebuah data.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang tersebut, pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana proses rekrutmen bakal calon Walikota Solo 2020 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang di dalamnya terdapat dinamika yang memperlihatkan personalisasi partai?
2. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi penetapan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai calon walikota Solo?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses rekrutmen partai politik dalam fungsi rekrutmen politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam menentukan calon Walikota Solo pada pilkada serentak 2020.

I.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Akademis

Menjadi salah satu rujukan bagi para perstudi yang berminat untuk mengetahui mekanisme fungsi rekrutmen politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam menentukan calon walikota Solo pada pilkada serentak 2020 dan bagaimana hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi rekrutmen

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa, peneliti, dan masyarakat untuk mengetahui dinamika dalam fungsi rekrutmen kepala daerah khususnya di kota Solo

I.5 Sistematika Penulisan

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisikan latarbelakang masalah yang juga memuat penelitian terdahulu, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini memuat konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian serta kerangka pemikiran dalam penelitian ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bagian ini terdapat objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, dan tabel rencana waktu.

BAB IV

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DALAM PEMILIHAN BAKAL CALON WALIKOTA SOLO 2020

Pada bagian ini berisikan pembahasan terkait dengan gambaran umum dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari aspek sejarah partai, struktur kepengurusan partai ditingkat Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Cabang Kota Surakarta, serta eksistensi politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Solo.

BAB V

TERPILIHNYA GIBRAN RAKABUMING RAKA SEBAGAI CALON WALIKOTA SOLO DI INTERNAL PARTAI DEMOKRASI INDONESIA (PDI) PERJUANGAN

Pada bagian ini berisikan pembahasan terkait dengan proses rekrutmen bakal calon Walikota Solo yang diawali dengan proses penjaringan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Kota Surakarta, hingga penetapan yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini berisikan kesimpulan dari peneliti hasil dari analisis yang menggunakan argumentasi teoritik yang telah terangkum dari pembahasan serta terdapat saran yang bersifat implikatif yang dapat diterapkan (saran praktis) dan saran yang bersifat pengembangan bagi kekurangan pada penelitian ini (saran teoritis).

DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian ini memuat berbagai referensi yang digunakan dalam menyusun skripsi ini.